

ARTIKEL

**SISTEM INFORMASI REGISTRASI PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN NGANJUK**



Oleh:

DEVY DIAN PRATAMA

14.1.03.03.0002

Dibimbing oleh :

- 1. Erna Daniati, S. Kom., M.Kom**
- 2. Rini Indriati, S. Kom., M.Kom**

**SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2018**



SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018


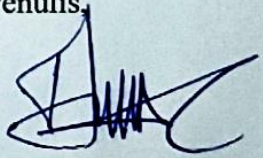
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Devy Dian Pratama
NPM : 14.1.03.03.0002
Telepon/HP : 085853448835
Alamat Surel (Email) : dianpratama10@yahoo.com
Judul Artikel : Sistem Informasi Registrasi Pelayanan Perizinan
Kabupaten Nganjuk
Fakultas – Program Studi : Fakultas Teknik – Sistem Informasi
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. K.H. Achmad Dahlan no. 76 Kota Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

- artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 25 Juli 2018
<p>Pembimbing I</p>  <p><u>Erna Daniati S.Kom., M.Kom</u> NIDN. 0723058501</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p><u>Rini Indriati S.Kom., M.Kom</u> NIDN. 072057003</p>	<p>Penulis,</p>  <p><u>Devy Dian Pratama</u> NPM.14.1.03.03.0002</p>

SISTEM INFORMASI REGISTRASI PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN NGANJUK

Devy Dian Pratama

14.1.03.03.0002

Fakultas Teknik – Sistem Informasi

dianpratama10@yahoo.com

Erna Daniati S.Kom.,M.Kom dan Rini Indriati S.Kom.,M.Kom

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Devy Dian Pratama : “Sistem Informasi Registrasi Pelayanan Perizinan Kabupaten Nganjuk”, Skripsi, Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Nusantara PGRI Kediri 2018.

Sistem Informasi Registrasi Pelayanan Perizinan adalah sistem informasi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengurusan surat izin (SIUP) Surat Izin Usaha Perdagangan dan (TDP) Tanda Daftar Perusahaan antara pemohon dengan pegawai perizinan. Sebuah sistem informasi registrasi yang baik harus dapat membantu memudahkan pemohon untuk proses pengajuan izin SIUP dan TDP.

Dalam penelitian ini berisikan sebuah pembuatan sistem informasi registrasi pada pelayanan perizinan kabupaten nganjuk berbasis web. Kantor (DPMPTSP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan satu satunya kantor perizinan di kabupaten nganjuk dan juga menjadi tempat pembuatan surat izin yang utamanya izin SIUP dan TDP.

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan waterfall. Dengan 5 tahapan yaitu perencanaan, analisa sistem, desain, implementasi dan pengujian. Dalam proses perencanaan dilakukan pengumpulan data berupa identifikasi masalah dengan cara observasi untuk menentukan kebutuhan pemohon. Dalam proses analisa dilakukan menganalisa proses bisnis. Untuk desain digunakan untuk merancang proses bisnis menggunakan BPMN dan pemodelan data menggunakan DFD lanjutnya dijabarkan dalam database dengan menggunakan MySQL dan desain tampilan pengguna. Tahap selanjutnya adalah implementasi dengan menggunakan bahasa *pemrograman* PHP dengan tools *Notepad++*. Hasil dari *user interface* tersebut diuji menggunakan metode pengujian *Black Box*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem informasi registrasi ini dilakukan untuk memudahkan pemohon untuk melakukan pendaftaran atau melakukan pembuatan izin SIUP dan TDP dengan tanpa harus datang ke kantor terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil analisa ini peneliti menyampaikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi yang telah dirancang yaitu perlunya penambahan fitur fitur yang lain dalam sistem seperti sistem validasi , dan juga ditambahkan sistem notifikasi.

KATA KUNCI : Registrasi, pelayanan perizinan, *online*.

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan dan kemajuan otonomi daerah akan terus digalakkan hingga terwujudnya otonomi daerah yang diharapkan yakni otonomi daerah yang mandiri, sehingga ketergantungan pada

pusat dapat berkurang serta otonomi daerah tersebut bisa menjadi wadah bagi masyarakat dengan memberikan tanggapan dan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kapasitas dan kehendak dari aspirasi masyarakat yang ada di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong pemikiran baru bagaimana menata kewenangan yang efektif dan efisien. Artinya pemerintahan dapat diselenggarakan secara demokratis.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip yang nyata adalah prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab. (Waluyo,2007 : 206).

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh aktor dalam sebuah negara. Meskipun demikian, peran pemerintah tentunya masih sangat dibutuhkan terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Pada dasarnya, pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa, dan administratif. Wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan, baik yang bersifat non perizinan maupun perizinan. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, demikian juga perizinan yang

terkait dengan kegiatan usaha. Penerapan otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam hal perizinan

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Dalam arti bahwa masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah, cepat, dan ramah yang pada akhirnya mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepala PTSP diberi pelimpahan kewenangan untuk menandatangani izin yang masuk, hal ini berarti penyederhanaan pelayanan.

Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah dan murah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu).

Pelayanan merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan.

Dalam hal penyediaan pelayanan perizinan, petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan. Maka, pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dalam pelaksanaan Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada

setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit - belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak - balik dari satu kantor ke kantor yang lain hanya untuk mengurus suatu layanan perizinan dan non perizinan.

Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan izin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun.

II. KAJIAN PUSTAKA

Ahmad Haidar Mirza (2013) Dengan Judul Aplikasi Pelayanan Perizinan Berbasis Web Pada Kabupaten Ogan

Komering Iilir. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas sistem pelayanan yang sedang berlangsung, mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan masyarakat, menyusun sistem, prosedur dan mekanisme pelayanan prima dan memberikan pelatihan kepada *end user*.

Mazidatul Himah K. dan M. Fikri Hidayattullah (2016) Dengan Judul Sistem Informasi Pendaftaran Online Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Pekalongan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan layanan perizinan dan pemahaman kepada masyarakat

Sarbani Septa Darma (2015) Rancangan Sistem Informasi Kepengurusan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Pada Kantor Pelayanan Izin Terpadu Kota Pangkalpinang, Tujuan dari Penelitian ini adalah memberikan layanan administrasi serta informasi yang baik kepada pemohon, Meringankan pekerjaan dalam mengontrol data dan membuat hasil laporan kepada pimpinan.

Eva Kurniawaty (2012), dengan Judul Sistem Informasi Perijinan Online Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Surabaya , Membangun Sistem Pelayanan Perizinan Online sehingga masyarakat dapat mengajukan permohonan perizinan

secara online, sehingga tidak harus melakukannya secara manual.

Davit Irawan (2018), Dengan judul Implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Izin Usaha Pada Dinas Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas Berbasis Website, Penggunaan website dalam menyampaikan informasi sangat membantu dan bermanfaat bagi semua pihak, salah satunya pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas yang beralamatkan di Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas. memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat dalam meningkatkan efektifitas dan keefesienan setiap melakukan pendaftaran izin usaha. penggunaan website secara online dapat mempercepat kinerja pegawai dalam penerimaan pendaftaran izin usaha.

(Erna Danitai dan Nalsa Cintya Resti Oktober 2017) Pada analisis dibagi menjadi dua yakni analisis permasalahan dan pemecahannya berdasarkan refrensi sebelumnya. Sedangkan analisis kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi. Selanjutnya tahapan perancangan yakni lanjutan dari tahapan analisis hal tersebut akan menghasilkan rancangan yang memenuhi kebutuhan yang ditentukan selama tahapan analisis sistem. Tahap perancangan ini menghasilkan rancangan

awal berupa Sistem yang dibangun diimplementasikan dalam bentuk aplikasi desktop. Implementasi sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan sistem manajemen basisdata menggunakan mysql.

III. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode model air terjun (waterfall). Model air terjun *Waterfall* menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai analisis, desain, implementasi, pengujian, dan tahap pendukung (support).

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan adalah tahap awal pengembangan sistem yang mendefinisikan perkiraan kebutuhan - kebutuhan sumberdaya. Dalam tahap ini juga dilakukan langkah-langkah berupa: mendefinisikan masalah, menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi kendala-kendala sistem dan membuat studi kelayakan.

2. Analisis (*Analysis*)

Tahap analisis merupakan tahap penelitian atas sistem yang berjalan dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru dengan menggunakan tools atau alat bantu DFD (*Data Flow Diagram*) dengan *software* visual paradigm.

3. Desain (*Design*)

Tahap Design yaitu tahap dalam menentukan proses data yang diperlukan oleh sistem baru dengan tujuan memenuhi kebutuhan user dengan alat bantu DFD dengan *software* visual paradigm ERD, Relasi Antar Tabel. Proses design akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding.

4. Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi adalah tahap dimana rancangan sistem yang dibentuk menjadi suatu kode (program) yang siap untuk dioperasikan. Langkah-langkahnya yaitu : menyiapkan fasilitas fisik dan personil, dan melakukan simulasi.

5. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Setelah melakukan implementasi terhadap sistem baru, tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah pemakaian atau penggunaan, audit sistem, penjagaan, perbaikan dan pengembangan *system*.

IV. HASIL DAN KESIMPULAN

1. Tampilan Halaman Masuk

Pemohon

Pemohon akan di hadapkan dengan tampilan dimana pemohon akan di tujukan untuk memilih form pemohon.



1.1 Tampilan Halaman Masuk Pemohon

Tombol Form pemohon berfungsi sebagai alat penunjuk untuk pemohon yang akan mau mengajukan ijin.

2. Form Input Data Pemohon

Pemohon akan dihadapkan dengan tampilan dimana pemohon akan ditujukan untuk mengisi form pemohon.

1.2 Form input Data Pemohon

Tombol simpan berfungsi untuk mengirim data inputan pemohon, Dimulai dengan pemohon mengisi data pemohon sekaligus data perusahaan, setelah semuanya sudah diisi dengan benar maka pemohon dilanjutkan memilih tombol simpan maka data otomatis akan tersimpan didatabase.

3. Tampilan Data Output Pemohon

Tampilan data pemohon yang sudah masuk didatabase dan siap untuk diproses pegawai.

1.3 Output Data Pemohon

Output data pemohon berfungsi sebagai penyalur antara hasil inputan data pemohon ke pegawai secara komputerisasi dengan jaringan internet.

4. Tampilan Login FO

Petugas FO (*Front Office*) akan dihadapkan dengan tampilan dimana petugas FO (*Front Office*) akan ditujukan untuk mengisi NIP dan Password untuk akses ke halaman selanjutnya.

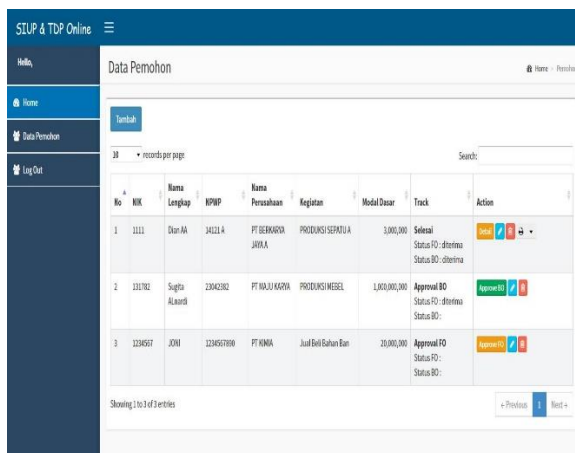


1.4 Tampilan Log in Petugas FO

Tampilan ini berfungsi sebagai masuknya hak akses yang sudah dimiliki oleh masing-masing pegawai.

5. Tampilan Menu Utama FO

Petugas FO (*Front Office*) akan dihadapkan dengan tampilan menu utama dimana petugas FO (*Front Office*) memiliki wewenang untuk *approve*, edit, tambah, hapus, di masing-masing data pemohon.



No	NIK	Nama Lengkap	NPIK	Nama Perusahaan	Kegiatan	Modal Dasar	Track	Action
1	1111	Dian AA	141214	PT BERKAWA JAYA	PRODUKSI SEPATU	3.000.000	Seleksi Status FO: diterima Status BO: diterima	[Print] [Refresh] [Delete]
2	121782	Sugita Alcaardi	22042802	PT HAJU KAWA	PRODUKSI MESIN	1.000.000.000	Approval BO Status FO: diterima Status BO:	[Approve] [Refresh] [Delete]
3	1234567	JONI	1234567890	PT KIMA	Jual Beli Bahan Baku	20.000.000	Approval FO Status FO: Status BO:	[Approve] [Refresh] [Delete]

1.5 Tampilan Menu Utama Petugas FO

Tombol *approve* berfungsi untuk menentukan antara data pemohon tersebut diterima atau tidak (diterima maka langsung menunggu *approve* dari BO, ditolak maka menunggu pemohon untuk datang ke kantor), tombol *edit* berfungsi untuk merubah data pemohon jika data pemohon mengalami salah input (Perubahan data biasanya terjadi ketika pemohon datang langsung dan diinputkan oleh petugas FO (*Front Office*) dan petugas FO (*Front Office*) melihat kesalahan dalam input), tombol *delete* berfungsi untuk menghapus

data pemohon, tombol *tambah* berfungsi untuk menambah data pemohon.

6. Tampilan Login BO

Petugas BO (*Back Office*) akan dihadapkan dengan tampilan dimana petugas BO (*Back Office*) akan di tujukan untuk mengisi NIP dan Password untuk akses ke halaman selanjutnya.



E-REGISTER SIUP & TDP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NGANJUK

NIP:

Password:

Login Pegawai

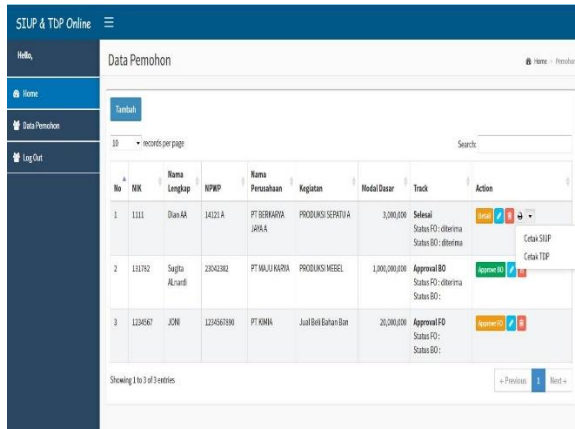
Form Pemohon

1.6 Tampilan Log in Petugas BO

Tampilan ini berfungsi sebagai masuknya hak akses yang sudah dimiliki oleh masing-masing pegawai.

7. Tampilan Menu Utama BO

Petugas BO (*Back Office*) akan dihadapkan dengan tampilan menu utama dimana petugas BO (*Back Office*) memiliki wewenang untuk *approve*, *edit*, tambah, hapus, dimasing - masing data pemohon, dan memiliki wewenang untuk cetak data SIUP dan TDP ketika ditekan tombol cetak



No	NIK	Nama Lengkap	NPKW	Nama Perusahaan	Kegiatan	Modal Dasar	Track	Action
1	1111	Dian AA	14121 A	PT BERKAWA JARPA	PRODUKSI SEPATU A	3,000,000	Selesai Status FO: diterima Status BO: diterima	Print Cetak SIUP Cetak TDP
2	111782	Sugita Al-rardi	23042882	PT MALU KARNA	PRODUKSI MESEK	1,000,000,000	Approval BO Status FO: diterima Status BO:	Approve FO
3	113467	JONI	1234567890	PT KINNA	Jual Beli Bahan Baku	20,000,000	Approval FO Status FO: Status BO:	Approve FO

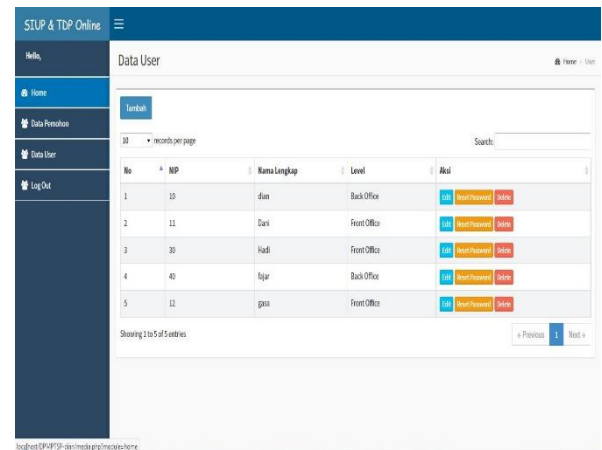
1.7 Tampilan Menu Utama Petugas BO

Tombol *approve* berfungsi untuk menentukan antara data pemohon tersebut diterima atau tidak (diterima maka langsung menunggu *approve* dari BO (*Back Office*), jika ditolak maka menunggu pemohon untuk datang ke kantor), tombol edit berfungsi untuk merubah data pemohon jika data pemohon mengalami salah input (Perubahan data biasanya sangat jarang terjadi karena data sudah diverifikasi oleh petugas FO (*Front Office*), tombol delete berfungsi untuk menghapus data pemohon, tombol tambah berfungsi untuk menambah data pemohon, dan tombol cetak berfungsi untuk mencetak file data pemohon SIUP dan TDP yang ada di database .

8. Tampilan Data User Pegawai

Tampilan data user adalah dimana tempat pembuatan akun, perubahan akun, dan tentunya untuk digunakan sebagai hak akses masuk petugas FO (*Front Office*) dan

BO (*Back Office*).Tampilan data user terletak di BO.



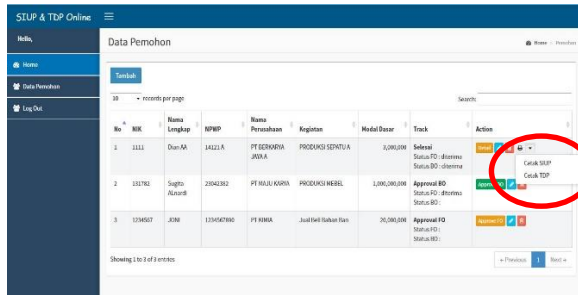
No	NIP	Nama Lengkap	Level	Aksi
1	10	dan	Back Office	Edit Reset Password Delete
2	11	Dani	Front Office	Edit Reset Password Delete
3	20	Hadi	Front Office	Edit Reset Password Delete
4	40	Bajar	Back Office	Edit Reset Password Delete
5	12	gata	Front Office	Edit Reset Password Delete

1.8 Tampilan Data User Pegawai

Ditombol tambah berfungsi sebagai menambahkan akun baru ke petugas, dan edit untuk merubah , reset password untuk merubah password, delete untuk menghapus user.

9. Tampilan Cetak Data SIUP dan TDP

Petugas BO (*Back Office*) akan dihadapkan dengan tampilan menu utama dimana petugas BO (*Back Office*) memiliki wewenang untuk approve , edit, tambah, hapus ,di masing - masing data pemohon, dan memiliki wewenang untuk cetak laporan data pemohon ketika ditekan tombol download (dicetak ketika petugas FO (*Front Office*) dan BO (*Back Office*) sudah selesai approve).



No.	NIK	Nama Lengkap	NPWP	Nama Perusahaan	Kegiatan	Modal Dasar	Status	Action
1	1111	Dun-MP	141214	PT SEKONDA JABA A	PROSEKSI SEPATU A	1,000,000,000	Revisi Status:FO -ditunggu Status:BO -ditunggu	Cetak SIUP Cetak TDP
2	131761	Sigitu Akusari	21042302	PT RUMAH KUNDA	PROSEKSI MESEK	1,000,000,000	Approval BO Status:FO -ditunggu Status:BO:	
3	124607	JONI	1210427800	PT HUKA	Jual Beli Bekas Ban	20,000,000	Approval FO Status:FO: Status:BO:	

1.9 Tampilan Cetak Data SIUP dan TDP

Fungsi tombol cetak sebagai cetak data SIUP dan TDP yang dimana menunggu *approve* dari petugas FO (*Front Office*) dan BO (*Back Office*), dan jika ada status terbilang ditolak, maka data akan tetap dicetak, hanya saja nanti data pemohon yang sudah di download akan di rubah lagi di *Mc.Word*.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sistem informasi registrasi pelayanan perizinan pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk ini yang diintegrasikan pada permohonan pengajuan izin SIUP dan TDP yaitu perubahan terhadap alur permohonan izin, yang mana dengan perubahan sistem informasi registrasi pengelolaan data dapat dilakukan secara online.

Proses informasi mengenai pendaftaran yang mengacu pada sistem e-registrasi pada perizinan, perubahan dijumpai terhadap struktur organisasi, yang mana seharusnya data-data atau informasi lainnya diperoleh

dari bawahan atau atasan kini kita secara mandiri dapat memperolehnya dari komputer sendiri.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisa ini peneliti menyampaikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi yang telah dirancang yaitu perlunya penambahan fitur fitur yang lain dalam sistem seperti sistem validasi, dan juga ditambahkan sistem notifikasi..

VI. DAFTAR PUSTAKA

Darma, S. S. (2013). Rancangan Sistem Informasi Kepengurusan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Pada Kantor Pelayanan Izin Terpadu Kota Pangkalpinang. *Tidak Di Publikasikan*.

Hartono, S. (2015). Lembaga Kursus Demi Music Center. *ComTech*, 6(9), 44–54.

Irawan, D. (2018). Implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Izin Usaha Pada Dinas Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas Berbasis Website. *Jurnal Informanika*, 4(1), 6–16.

K, M. H., & Hidayattullah, M. F. (2016). Sistem Informasi Pendaftaran Online Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Bpmppt) Kabupaten Pekalongan. *Surya Informatika*, 3(1), 5–9.

Kurniawaty, E. (2012). Sistem Informasi Perijinan Online Dinas Surabaya. Teknik. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Mirza, A. H. (2013). Aplikasi Pelayanan Perizinan Berbasis Web Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Imiah MATRIK*, 15(12), 145–154.

Saleh, M. (2018, 7 23). System Development Life Cycle (SDLC). Retrieved from <http://maulindaugsalemba.blogspot.com/2016/06/system-development-life-cycle-sdlc.html>

Jenderal, J., Selindung, S., Pangkalpinang, L., & Babel, K. (n.d.). Rancangan Sistem Informasi Pembuatan Siup Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Kppt) Pangkalpinang. *Tidak Di Publikasikan*, 1–7.

Danita, E., & Resti, N. C. (2017). Sistem Alokasi Tugas Kepanitiaan Menggunakan Metode Penugasan. *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, 9, 1277–1289.

Pangestu, H. 2010. Model Perencanaan Strategi Bisnis Dan Teknologi. *Comtech* Vol.1 No.2, 367-378.

Chandra, M., Suroso, A. I., & Hermadi, I. 2015. Evaluasi Cobit Dan Perancangan It Balanced Scorecard Untuk Perbaikan Penerapan System Development. *Jurnal Manajemen Teknologi* Vol.14 No. 3, 231-245.